

**EFEKTIVITAS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG SUKOHARJO DALAM
MENINGKATKAN JUMLAH KEPESERTAAN**



LAPORAN KULIAH KERJA USAHA

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Program
Studi Strata 1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Surakarta

Disusun oleh :

KIRANA DIAN PUSPITASARI

20.11.0053

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

2023

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KULIAH KERJA USAHA

Disusun Oleh :

Kirana Dian Puspitasari

20.11.0053

Telah disetujui dan disahkan dengan baik oleh
Pembimbing Laporan Kuliah Kerja Usaha, guna melengkapi
persyaratan untuk dapat menempuh mata Kuliah Tugas Akhir

Program Studi Manajemen

Surakarta, 11 APRIL 2023

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



(Drs. Muh. Jalari, S.E., M.M.)
NIDN : 0627106401

Kepala Program Studi Manajemen



(Ir. Rama Pamikatsih, S.E., M.B.A)
NIDN : 0610119201

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kuliah Kerja Usaha (KKU) ini guna memenuhi sebagian syarat Program Studi Strata 1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Dalam laporan ini penulis mengambil judul “ Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo Dalam Meningkatkan Jumlah Kepesertaan ”.

Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Usaha (KKU) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo. Selama penyusunan Laporan Kuliah Kerja Usaha (KKU) ini mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan do'a dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E.,M.M.,M.H. selaku Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
2. Ibu Tri Ratna Pamikatsih, S.E., M.B.A. selaku Ketua Program Studi Manajemen
3. Bapak Drs. Muh. Jalari, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan laporan ini hingga selesai.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
5. Teristimewa untuk kedua orangtua saya tercinta yang telah memberikan semangat tiada henti kepada saya.
6. Teman-teman S1 Manajemen A tercinta yang selalu memotivasi dan memberikan semangat.
7. Dan seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan proses magang serta memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan KKU.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan dan kemampuan pada diri penulis. Maka dengan sepenuh hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan KKU ini.

Semoga Laporan Kuliah Kerja Usaha ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi semua pihak pada umumnya dan bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.

Surakarta,

Kirana Dian Puspitasari

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
LAPORAN KULIAH KERJA USAHA	1
1. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
2. DIVISI KERJA DAN KEGIATAN	3
3. POKOK MASALAH	6
4. PEMBAHASAN	13
5. SIMPULAN DAN SARAN.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	16
LAMPIRAN.....	17

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 : Data Sosialisasi pada Bulan Februari – Maret.....	10
---	----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur BPJS Ketenagakerjaan	3

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Logbook Mahasiswa	17
Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Kuliah Kerja Usaha (KKU)	20
Lampiran 3 Presensi Selama Magang.....	22

LAPORAN KULIAH KERJA USAHA

1. LATAR BELAKANG MASALAH

BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah perusahaan jaminan sosial dan proteksi(perlindungan) bagi pekerja Indonesia maupun pekerja asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan. BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri merupakan hasil transformasi dari PT Jamsostek. Sebelumnya PT Jamsostek inilah yang mengurus masalah proteksi dan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia yang bertanggung jawab kepada presiden. Pasal 34 ayat (2) meletakkan jaminan sosial sebagai elemen penyelenggaraan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang tersebut selanjutnya, pada akhir tahun 2004 pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat (2) yang kini berbunyi negara mengembangkan sistem 2 jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Jaminan sosial yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atau buruh adalah merupakan kewajiban yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung keluarganya. Oleh karenanya, kesejahteraan yang dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Resiko-resiko sosial tersebut apabila tidak ada yang menangani, menjamin, melindungi para pekerja dari resiko-resiko tersebut pasti pekerja akan kesulitan untuk mendapatkan biaya perawatan dan pengobatannya, agar para pekerja bisa merasa lebih aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 diharapkan dapat memberikan perlindungan dan adanya rasa aman dari para pekerja sehingga pekerja dapat

lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Khusus untuk tenaga kerja ada lembaga sendiri yang memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerja yaitu Jamsostek, yang mana wilayahnya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia berupa empat program yang sifatnya wajib diberikan kepada tenaga kerja diantaranya adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Kemudian selanjutnya pada tahun 2011, ditetapkanlah Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat Undang-undang tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek akan berubah nama menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja formal, melainkan juga untuk pekerja non formal. Pekerja non formal masuk ke dalam kategori pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Pekerjaan yang termasuk ke dalam pekerjaan non formal yaitu seperti wirausaha, freelancer, pekerja lepas dan PKL.

Dengan adanya program Bukan Penerima Upah (BPU) ini dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan, kematian, sehingga perlu ada satu alat pengaman, supaya apabila terjadi risiko sosial ekonomi tadi tidak akan mengganggu kesejahteraan secara drastis. Cakupan program perlindungan ini adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memiliki manfaat berupa santunan uang dan pelayanan kesehatan berupa perawatan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan medis yang diberikan kepada pasien yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Sedangkan (JKM) mempunyai manfaat berupa santunan uang tunai kematian, santunan berkala, biaya pemakaman dan beasiswa Pendidikan. Dan untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) menjamin agar peserta

menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, cacat total, dan meninggal dunia. Uang tunai yang akan diterima sebesar akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya.

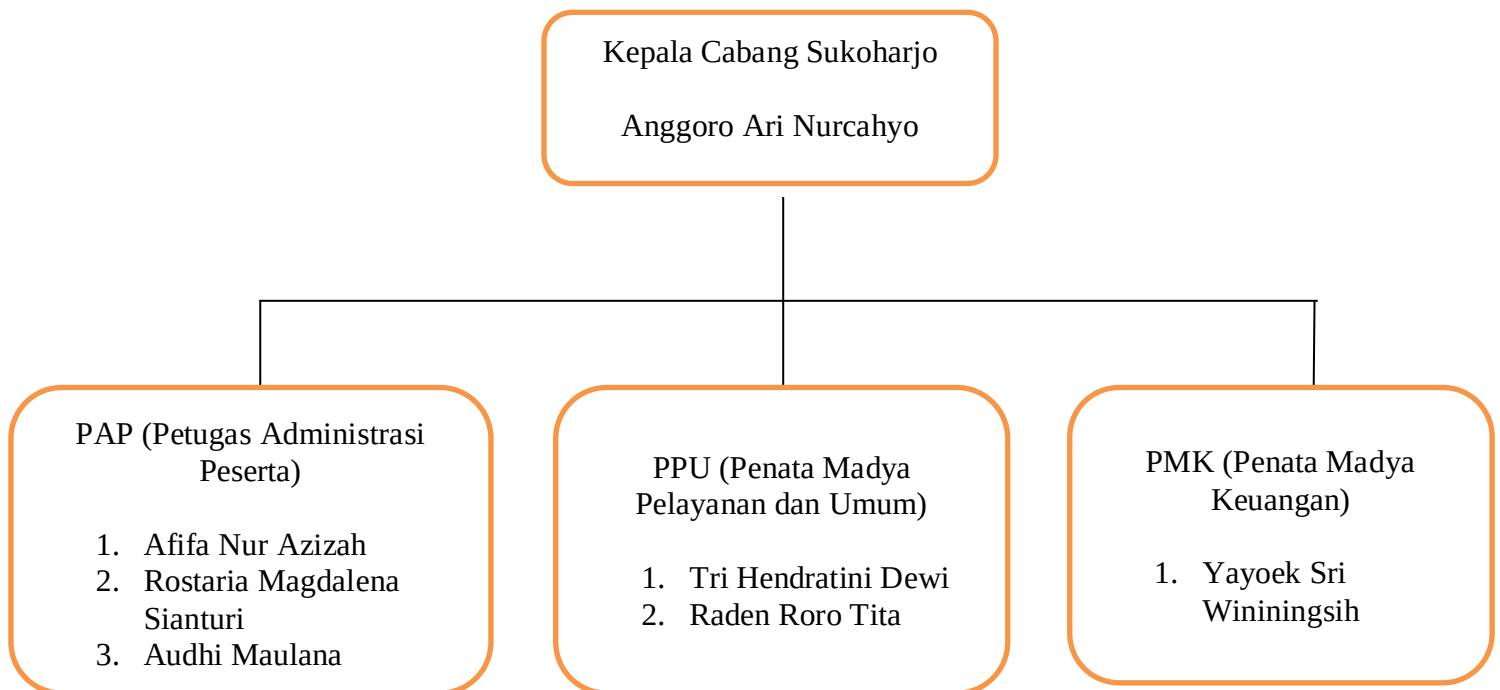
Visi misi dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo yaitu menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kebanggaan bangsa yang amanah, bertata kelola baik, serta unggul dalam operasional dan pelayanan. Misi dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo yaitu melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja, mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. DIVISI KERJA DAN KEGIATAN

A. Divisi Kerja

1) Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo



Gambar 1 Struktur BPJS Ketenagakerjaan

2) Deskripsi Tugas

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo memiliki tiga Divisi kerja antara lain yaitu Divisi Pelayanan, Keuangan, dan Kepesertaan. Selama magang Mahasiswa ditempatkan pada Divisi Kepesertaan, Pelayanan, Keuangan serta menjaga Stand BPJS Ketenagakerjaan di Mall Pelayanan Publik Sukoharjo. Berdasarkan dari beberapa divisi kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing – masing yaitu :

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo yaitu :
 - 1) Membina hubungan dengan perusahaan dan peserta program BPJS Ketenagakerjaan
 - 2) Melakukan kegiatan analisis potensi pasar
 - 3) Melakukan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan
 - 4) Mengendalikan kasus klaim yang belum / tidak di tindak lanjuti oleh peserta untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Keuangan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo yaitu :
 - 1) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang keuangan cabang.
 - 2) Menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya dibidang keuangancabang.
 - 3) Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan agar kegiatan operasional cabang dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.
 - 4) Mengkoordinasikan pencatatan transaksi keuangan, untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang lengkap dan akurat.
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo yaitu :
 - 1) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan pemasaran.
 - 2) Menghimpun informasi dari berbagai instansi dan organisasi terkait untuk mendapatkan data perusahaan sebagai dasar untuk menyusun data potensi dan

menetapkan target kepesertaan.

- 3) Menerima pendaftaran proyek dan peserta sektor informal.b.
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan kepada peserta dan pihak- pihak terkait lainnya.
- 5) Melaksanakan kegiatan pemasaran, guna meningkatkan perluasan kepesertaan sesuai target.

B. Kegiatan

Sistem Kegiatan Kuliah Kerja Usaha (KKU) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo yang dilaksanakan mahasiswa ditempatkan pada beberapa bagian yang disesuaikan dengan bagian yang membutuhkan bantuan. Berikut ini merupakan beberapa kegiatan selama Kuliah Kerja Usaha berlangsung salah satunya pada Divisi Keuangan. Divisi kerja ini melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo yaitu melakukan validasi pada pembayaran klaim JHT, mengklaim daftar pembayaran dengan monitoring dokumen digital yang berada di SMILE (Sistem Informasi Perlindungan Pekerja), monitoring realisasi dan pengeseran anggaran, merekap Cek dan Bilyet Giro, mengklaim siap untuk dibayarkan melalui rekening sentralisasi kantor, menstempel surat pemberitahuan tagihan iuran dan memasukan kedalam amplop, mencetak voucher memorial pada program JKK,JHT,JP,JKM,dan JKP

Sedangkan pada Divisi Pelayanan yaitu melakukan kegiatan scan data beasiswa, menjadikan 1 rangkap data sesuai dengan tanggal dan bulannya, mengarsip dokumen-dokumen peserta, membantu peserta untuk melakukan klaim melalui aplikasi JMO atau lapak asik, melayani dan menjaga stand di Mall Pelayanan Publik (MPP)

Dan pada Divisi Kepesertaan yaitu melakukan kegiatan memasukan data peserta ke co card, memasukan sistem pelaporan data perusahaan ke kode klaim, mencari nomor telepon di google dari pihak yang terdaftar di BPJS, monitoring cetak RSJHT, mengetik surat tagihan, koreksi data BPU internal kantor Bukan Penerima Upah pada aplikasi SMILE, serta mengikuti sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan.

3. POKOK MASALAH

Berdasarkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Usaha, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo memiliki 5 program yaitu sebagai berikut:

1. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua merupakan jaminan yang memberikan perlindungan kepada para pekerja terhadap resiko yang terjadi di hari tua, dimana produktivitas pekerja sudah menurun. JHT merupakan sistem tabungan hari tua atau 30 persen untuk pembiayaan perumahan. Pencairan manfaat pada kepesertaan 10 tahun tersebut hanya dapat dipilih salah satu, baik untuk persiapan hari tua ataupun pembiayaan perumahan.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Tindakan medis yang dilakukan karena terjadinya kecelakaan kerja ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai pekerja dinyatakan sembuh. Benefit lainnya yang mengalami peningkatan antara lain biaya angkutan darat, laut, udara, biaya pemakaman serta beasiswa pendidikan bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap karena kecelakaan kerja. Jika terjadi cacat sebagian permanen, pekerja juga akan mendapat pelatihan khusus agar tetap bisa kembali bekerja melalui penyempurnaan manfaat jaminan kecelakaan kerja Return To Work (JKK-RTW) disamping santunan cacat yang diterima. Dengan iuran sebesar 0,24%-1,74% dari upah sebulan, pekerja sudah bisa terlindungi dari resiko kecelakaan kerja.

3. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian merupakan pemberian manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Peningkatan manfaat terdapat pada santunan sekaligus, santunan berkala dan biaya pemakaman dengan total santunan sebesar Rp. 24 juta dan pemberian beasiswa bagi anak pekerja yang ditinggalkan sebesar Rp. 12 juta

bagi peserta yang sudah memasuki masa iur 5 tahun. Hal ini diberikan kepada peserta agar apabila terjadi resiko meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan terutama anak pekerja, mendapatkan bantuan biaya yang diperuntukkan untuk pendidikan. Dengan iuran sebesar 0,3 persen dari upah yang dilaporkan, peserta sudah terlindungi pada program jaminan kematian

4. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan Pensiun merupakan program jaminan sosial dengan skema manfaat pasti yang diberikan kepada pekerja setiap bulannya, saat memasuki masa pensiun 56 tahun atau mengalami cacat total permanen dan atau meninggal dunia yang diberikan kepada pekerja atau ahli waris yang sah. Jaminan pensiun dipersiapkan bagi pekerja untuk tetap mendapatkan penghasilan bulanan disaat memasuki usia yang tidak lagi produktif. Dengan iuran yang ditetapkan sebesar 3% (1 persen pekerja dan 2 persen pengusaha) dan dengan masa iur 15 tahun, peserta dapat menikmati dana pensiun di masa pensiunnya nanti. Selain peserta, manfaat pensiun juga dapat diterima oleh ahli waris janda/duda dari peserta yang meninggal dengan benefit mencapai 50 persen dari formulasi manfaat pensiun, sampai ahli waris meninggal dunia atau menikah lagi. Selain itu, ahli waris anak dari peserta yang meninggal dunia juga mendapatkan benefit pensiun mencapai 50 persen dari formulasi manfaat pensiun, sampai berusia 23 tahun, bekerja atau menikah. Untuk peserta lajang yang meninggal dunia, manfaat pensiun diterima oleh orang tua sampai batas waktu tertentu dengan benefit mencapai 20 persen dari formulasi pensiun

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Jaminan Kehilangan Pekerjaan merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Lewat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapat pekerjaan kembali. JKP memiliki tiga manfaat yaitu berupa uang tunai yang diberikan setiap bulannya, paling banyak 6 bulan upah dengan besaran manfaat 45 persen dari upah sebulan untuk 3 bulan

pertama dan 25 persen dari upah sebulan untuk 3 bulan berikutnya, batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5 juta. Jika upah peserta melebihi batas atas upah, jumlah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat adalah batas atas upah. Manfaat yang kedua yaitu informasi pasar kerja berupa penyediaan data lowongan kerja dan manfaat yang terakhir yaitu pelatihan kerja yang dilakukan secara online atau offline. Pelatihan kerja dilakukan melalui lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan. Namun manfaat tersebut dikecualikan bagi peserta yang mengalami PHK dengan alasan mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia.

- **Proses tahapan manajemen startegi dalam upaya meningkatkan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo**

Agar dapat menciptakan manajemen yang baik, maka BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo juga berusaha melakukan manajemen strategi guna meningkatkan kepesertaan khususnya wilayah Sukoharjo. Manajemen strategi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo dengan melakukan tiga proses tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaa dan evaluasi.

Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo Menerapkan tahapan perencanaan strategi dengan beberapa proses guna meningkatkan kepesertaan, strategi yang pertama dengan analisis SWOT yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo ini sebagai berikut :

1. Strenght (Kekuatan)

Dengan adanya landasan hukum mengenai perusahaan yang bertanggungjawab langsung pada Presiden RI, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo pastinya sangat membantu para pekerja di seluruh Indonesia baik Pekerja Penerima Upah (PU) maupun pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

2. Weakness (Kelemahan)

Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo ini memiliki kelemahan yaitu pada kurangnya karyawan yang bekerja di kantor ini, menyebabkan karyawan bertanggungjawab pada dua bidang sekaligus yaitu bidang pelayanan dan pada bidang

kepesertaan. Selain itu luas kantor yang kecil menyebabkan kantor menjadi kurang efektif saat bekerja.

3. Oportunity (Peluang)

Peluang BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo ini adalah adanya Bantuan BSU yang diberikan pemerintah kepada pekerja yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat menjadi peluang bagi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo ini untuk memanfaatkan BSU tersebut sebagai strategi untuk meningkatkan kepesertaannya.

4. Treath (Ancaman)

Ancaman yang muncul pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo ini adalah dari pengarsipan dokumen, karena arsip dokumen-dokumen yang ada di kantor ini masih belum sepenuhnya terurus karena kurangnya karyawan yang ada di kantor ini menjadi kendala pengurusan arsip menjadi terbengkalai. Arsip dokumen sangat penting karena akan menjadi bahan pencocokan kepesertaan yang masih aktif ataupun peserta yang sudah habis masa iurannya dan telah melakukan pengklaiman yang harus dicocokkan dengan dokumen-dokumen arsip tersebut.

Setelah melakukan tahapan perencanaan melalui SWOT, tahapan selanjutnya yaitu dengan menentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo menentukan tujuan-tujuan tersebut yang akan digunakan sebagai salah satu untuk menciptakan strategi dalam meningkatkan kepesertaan. Tujuan jangka panjang yang akan dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo ini masih mengikuti anjuran dari BPJS Pusat Jakarta karena memang ini adalah kantor cabang. Tujuan jangka panjang yaitu untuk tahun-tahun kedepannya BPJS Ketenagakerjaan sudah mampu melakukan proses digitalisasi untuk menarik minat peserta dengan melakukan kegiatan semuanya secara online sehingga memudahkan peserta untuk mendaftar maupun melakukan pengeklaiman.

Sedangkan tujuan jangka pendek yang akan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo yaitu dengan melakukan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan pada setiap tenaga kerja, mulai dari tenaga kerja Penerima Upah (PU) maupun tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU), dan meningkatkan pelayanan online dan juga offline untuk meningkatkan jumlah kepesertaan.

Selanjutnya yang dilakukan pada tahapan perencanaan adalah penentuan strategi unggul. Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo juga mempunyai strategi unggul sebagai upaya meningkatkan jumlah kepesertaan adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker), Brilink BRI, Persusahaan-perusahaan di Sukoharjo dan masih banyak lainnya dan membentuk semacam organisasi yang nantinya akan merekrut calon peserta dari tenaga kerja. Hal ini termasuk strategi unggul karena sebagai langkah untuk memperluas jaringan kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo juga memudahkan mendapatkan info tenaga kerja untuk menariknya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya di wilayah Sukoharjo.

Tabel 1.1 : Data Sosialisasi pada Bulan Februari – Maret

NO	Kepesertaan	Lembaga	Jumlah Peserta
1.	Bukan Penerima Upah (BPU)	Sosialisasi bersama Gus Nabil di Kelurahan Kertonatan	300 Orang
2.	Bukan Penerima Upah (BPU)	Sosialisai bersama Agen Brilink BRI Kantor Cabang Sukoharjo	65 Orang
3.	Bukan Penerima Upah (BPU)	Sosialisasi bersama Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) di Kecamatan Bulu	15 Orang
4.	Bukan Penerima Upah (BPU)	Sosialisasi bersama Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) di Kecamatan Tawangsari	21 Orang
5.	Penerima Upah (PU)	Sosialisasi bersama Pt Zam-zam Tour and Travel di Sukoharjo	10 Orang
6.	Bukan Penerima Upah (BPU)	Sosialisasi bersama Karyawan Ayam Goreng Mulyani	46 Orang

Selain itu, dalam meningkatkan kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo juga melakukan keagenan yang bernama perisai. Perisai ini bertugas mencari kepesertaan di wilayah-wilayah yang sulit untuk diakses, dan BPJS Sukoharjo sama dengan dinas-dinas seperti Dinas Koperasi, dan UMKM, dan Asosiasi Pedagang Sukoharjo untuk menarik kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU).

Setelah tahapan perencanaan, proses selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan manajemen strategi dalam upaya meningkatkan jumlah kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo. Untuk menarik minat para tenaga kerja agar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan melakukan berbagai kebijakan seperti pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar RP. 600.000 selama 4 bulan kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji dibawah 5 juta dan melakukan rencana kerja dari potensi untuk memenuhi fasilitas yang dirasa kurang.

Langkah selanjutnya yang dilakukan pada tahap pelaksanaan adalah dengan memberikan motivasi kepada karyawan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo, selain itu dengan melakukan budaya organisasi dengan cara setiap pagi sebelum melakukan pekerjaan para karyawan dan pimpinan selalu melakukan aktivitas yaitu morning briefing seperti berdoa, penyampaian materi, pengarahan terhadap pekerjaan, penyampaian kendala yang nantinya akan diberikan solusi untuk memulai pekerjaan.

Tahap terakhir yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo dalam upaya meningkatkan jumlah kepesertaan yaitu dengan melakukan tahap evaluasi. Proses evaluasi pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo dengan cara memonitor hasil dari program yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan rapat mingguan, melakukan pengawasan, melakukan penilaian kinerja karyawan, selanjutnya yaitu melakukan langkah perbaikan dengan mengevaluasi strategi tahunkemarin masih bisakah digunakan pada tahun selanjutnya, mengidentifikasi hambatan pada program yang terlaksana kemudian mencari solusi untuk melakukan program kerja kembali.

- **Upaya optimalisasi manajemen strategi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo dalam meningkatkan kepesertaan**

Upaya optimalisasi manajemen strategi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo agar berjalan dengan sesuai yaitu dengan melakukan tiga cara yaitu dengan sosialisasi secara online dan offline , menunjukan peran bagi perusahaan dan para tenaga kerja yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan yang terakhir yaitu dengan melakukan identifikasi hambatan.

Cara yang kedua yaitu dengan menunjukan peran BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan dan para tenaga kerja yang mengikuti maupun yang tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Peran yang dilakukan yaitu apabila perusahaan tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dengan ketentuan UU BPJS Pasal 15 Ayat 1 yang menyatakan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS (Kesehatan maupun Ketenagakerjaan), sesuai dengan program jaminan social yang diikuti. Maka dari itu pemberi kerja wajib mendaftarkan perusahaan dan pekerja mereka ke BPJS Ketenagakerjaan. Adapun sanksi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan apabila perusahaan dan para pekerjanya tidak mendaftarkan diri menjadi kepesertaan yaitu dengan memberi sanksi administrasi seperti teguran tertulis dari BPJS Ketenagakerjaa, denda, tertutupnya berbagai akses pelayanan publik yang berkaitan dengan perusahaan, kesulitan mendapatkan Surat Izin Usaha, larangan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), larangan mengikuti proyek/tender, dan pencabutan ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Setelah peran-peran BPJS Ketenagakerjaan diberlakukan kepada calon peserta maka cara ketiga yang dilakukan untuk mengoptimalkan manajemen strategi yang sudah disusun yaitu dengan cara mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi ketidak ikut sertaan para tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan. Apabila ada perusahaan dan tenaga kerja yang tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan ini terjadi karena beberapa faktor. Dapat disimpulkan ada 4 faktor yang menghambat perusahaan dan tenaga kerja tidak mendaftarkan diri pada program BPJS Ketenagakerjaan. Empat faktor tersebut adalah 1) perusahaan masih kecil dan baru berdiri maka masih sulit untuk mereka mendaftarkan perusahaan maupun pekerjanya di program BPJS Ketenagakerjaan ini. 2) perusahaan dan para pekerjanya sudah terdaftar di

perusahaan asuransi swasta ataupun BPJS Kesehatan, juga pekerja sudah mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). 3) kurangnya pengetahuan dan pemahaman para tenaga kerja terkait program BPJS Ketenagakerjaan, 4) adanya tenaga kerja yang bersifat kontrak, jika nantinya pekerja tersebut mengundurkan diri pada perusahaan yang menaunginya sebelum masa kontraknya selesai sehingga tidak bisa didaftarkan di program BPJS Ketenagakerjaan.

4. PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Usaha (KKU) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo, terdapat permasalahan yang dihadapi dan beberapa solusi yang semoga dapat memberikan manfaat yaitu:

- ❖ Dalam menginput dan mengolah data, penulis memerlukan user id seperti pada aplikasi SMILE untuk masuk ke sistem online perusahaan. Yang menjadi kendala adalah penulis tidak memiliki user id untuk masuk ke aplikasi SMILE sehingga harus menunggu user id karyawan lainnya yang tidak digunakan. Selain itu, seringkali penulis harus menghentikan pekerjaan yang berhubungan dengan sistem karena user id yang penulis gunakan akan digunakan pula oleh pemiliknya. Yang mungkin menjadi solusi yaitu dengan dibukanya kesempatan Kuliah Kerja Usaha (KKU) oleh perusahaan yang bersangkutan seharusnya didukung pula dengan ketersediaan perangkat kerja yang diperlukan. Dengan tersedianya user id yang banyak maka akan lebih efektif dan efisien karena lebih banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan.
- ❖ Dikarena kesibukan, karyawan kurang memiliki waktu yang cukup untuk memberikan arahan yang jelas dan detail mengenai tata cara dalam mengelolah data. Hal ini membuat penulis harus bertanya berulang kali kepada karyawan. Untuk mengatasi masalah ini adalah cara yang dilakukan dengan lebih banyak bertanya kepada karyawan yang mungkin tidak terlalu sibuk, dengan demikian, pekerjaan dapat diselesaikan walaupun sedikit terlambat.
- ❖ Pada saat melakukan koreksi data, peserta banyak yang belum melengkapi data

dan ketidaksesuaian antara data yang ada di sistem dengan data yang telah ditulis peserta. Sehingga penulis harus mencari dan mengupdate data dalam jumlah yang banyak. Untuk mengatasi masalah penumpukan data yang tidak sesuai, karyawan yang bersangkutan perlu mengadakan monitoring atau pemantauan setiap beberapa bulan sekali dan segera mengupdate data sehingga data yang ada pada sistem merupakan data terbaru.

5. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan kesimpulan hasil Kuliah Kerja Usaha (KKU) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan 5 program jaminan sosial tenaga kerja meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
- b. Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Usaha (KKU) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo penulis ditempatkan pada bidang pelayanan, kepesertaan, dan keuangan.
- c. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Usaha (KKU) seperti ; penulis tidak memiliki user id pada aplikasi SMILE yang merupakan sistem online perusahaan sehingga dalam mengelolah data peserta, penulis harus menunggu user id karyawan lain yang tidak digunakan, karyawan yang bersangkutan kurang memberikan arahan yang jelas dalam cara bekerjanya. Kendala lainnya adalah ketidaksesuaian antara data pada sistem dengan data yang ditulis oleh peserta yang menyebabkan penulis harus mencari dan mengupdate data yang ada di sistem dalam jumlah yang cukup banyak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang diberikan untuk BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo yaitu

- a. Perlu menyediakan perangkat yang lebih memadai guna mendukung kegiatan kerja karyawan.
- b. Meningkatkan fungsi manajemen dalam perusahaan agar hasil yang dicapai lebih optimal dan memuaskan.
- c. Perlu melakukan penambahan jaringan wifi agar memperlancar sistem online pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Khainira. 2022. *Peraturan Pemerintah Terkait BPJS Ketenagakerjaan Karyawan*.

Jakarta: PT. Glints Indonesia Group.

Syahputra, Eqqi. 2022. *Perluas Jangkauan, BPJS Ketenagakerjaan Bikin Strategi ini*.

Jakarta: CNBC Indonesia.

Rahayu, Mutia Isni. 2023. *Ketahui Berbagai Program Dan Cara Mendaftar BPJS*

Ketenagakerjaan Bagi Karyawan. Jakarta: PT. Glints Indonesia Group.

Asyhadie, Zaeni dan Rahmawati Kusuma. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori*

dan Praktik Di Indonesia Edisi Pertama. Jakarta: Predana Media Group.

Anggakara, Meirza. 2022. *Sanksi Perusahaan Tidak Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan*.

Diakses pada 29 Maret, dari <https://www.linovhr.com/sanksi-perusahaan-tidak-mendaftarkan-bpjs-ketenagakerjaan>

LAMPIRAN

Nama : Kirana Dian Puspitasari
 Nim : 20110053
 Program Studi : S1 Manajemen
 Judul : Efektivitas Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)
 ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukoharjo Dalam Meningkatkan
 Jumlah Kepesertaan

Lampiran 1 Logbook Mahasiswa

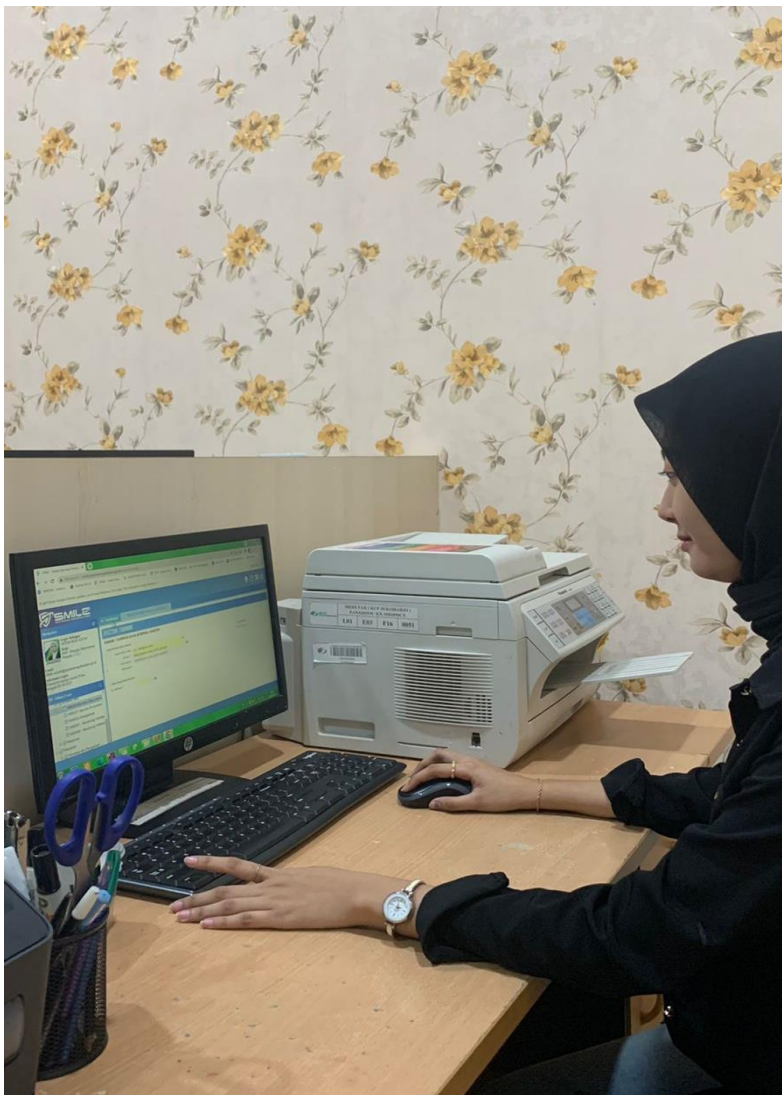
No	Tanggal Kegiatan	Kegiatan
1.	1 - 3 Februari 2023	- Foto untuk nametag - Melipat brosur - Menvalidasi pembayaran klaim jht - Melayani dan menjaga stand di mall pelayanan publik (MPP) - Menscan dokumen beasiswa
2.	6 – 10 Februari 2023	- Mengklaim daftar pembayaran dengan monitoring dokumen digital - Menscan dokumen - Penyampaian materi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan oleh Ibu Rostaria Magdalena - Melayani dan menjaga stand di mall pelayanan publik (MPP) - Menjadikan satu rangkap dokumen sesuai dengan tanggal dan bulannya - Memasukan data peserta ke co card - Memasukan sistem pelaporan data ke kode klaim - Memonitoring realisasi dan pengeseran anggaran

		data internal kantor - Koreksi data internal kantor
3.	13 – 17 Februari 2023	- Melayani dan menjaga stand di mall pelayanan public (MPP) - Mendata kode iuran pemberi gaji/badan usaha - Mengklaim siap untuk dibayar melalui rekening sentralisasi kantor pusat - Koreksi data internal kantor bukan penerima upah (BPU)
4.	20 – 24 Februari 2023	- Menjadikan 1 rangkap data sesuai dengan tanggal dan bulannya - Mengklaim daftar pembayaran dengan memonitoring dokumen digital - Melayani dan menjaga stand di mall pelayanan publik (MPP) - Mencetak lapopran RSJHT - Koreksi data internal kantor penerima upah (PU)
5.	27-28 Februari 2023	- Mencari nomor telepon apotik di yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan - Melayani dan menjaga stand di mall pelayanan publik (MPP)
6.	1 – 3 Maret 2023	- Mengetik surat tagihan - Merekap di excel Cek dan BG (Bilyet Giro) - Print voucher memorial JHT,JKK,JP,JKM, dan JKP
7.	6 – 10 Maret 2023	- Mengoreksi surat pemberitahuan iuran sudah dibayar atau belum - Melipat surat pemberitahuan iuran dan memasukan ke dalam amplop BPJS Ketenagakerjaan - Melayani dan menjaga stand di mall pelayanan

		publik - Merekap daftar hadir dari sosialisasi dengan Gus Nabil - Mengurutkan ktp dengan daftar hadir dari peserta sosialisasi dengan Gus Nabil
8.	13 – 17 Maret 2023	- Mencari alamat perusahaan tekstil yang ada di desa plumbon sukoharjo - Mengklaim daftar pembayaran dengan monitoring dokumen digital - Mengikuti sosialisasi bersama agen Brilink BRI cabang sukoharjo - Melayani dan menjaga stand di mall pelayanan publik (MPP) - Mencari toko/bukan penerima upah di google maps wilayah sukoharjo - Mencari NIK di duckcapil peserta yang mengikuti sosialisasi dengan Gus Nabil
9.	20 – 24 Maret 2023	- Melayani dan menjaga stand di mall pelayanan public (MPP) - Mengarsip dokumen JHT - Koreksi data internal kantor Bukan Penerima Upah (BPU)
10.	28 – 31 Maret 2023	- Memonitoring realisasi dan pengeseran anggaran data internal kantor - Mengklaim daftar pembayaran dengan monitoring dokumen digital - Melayani dan menjaga stand di mall pelayanan public (MPP) - Koreksi data internal kantor penerima upah (PU)

Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Kuliah Kerja Usaha (KKU)





Lampiran 3 Presensi Selama Magang



DAFTAR HADIR MAHASISWA STIE SURAKARTA
KEGIATAN KULIAH KERJA USAHA (KKU)

Periode 2021/2022

Nama Mahasiswa : KIRANA DIAN RUSPITASARI
 NIM : 2019052
 Pembimbing : Drs. H. Muhammad Jari, S.E., M.M.
 No. Telp Pembimbing :

Nama Instansi : BPJS. Ketenagakerjaan Sukoharjo
 Alamat Instansi : Jl. Raya Solo - Magelang, Jl. Slamet Riyadi No. 21A Sukoharjo
 Nama Pimpinan : Bpk. Anggoro Ari Nurcahyo
 No. Telp Pimpinan :

FEBRUARI 2023																											
RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
✓	✓	✓	LIBUR	LIBUR	✓	✓	✓	✓	✓	LIBUR	LIBUR	✓	✓	✓	✓	✓	LIBUR	LIBUR	✓	✓	✓	✓	LIBUR	LIBUR	✓	✓	

MARET 2023																														
RAHU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RAHU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RAHU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RAHU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RAHU	KAMIS	JUM'AT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
✓	✓	✓	LIBUR	LIBUR	✓	✓	✓	✓	✓	LIBUR	LIBUR	✓	✓	✓	✓	✓	LIBUR	LIBUR	✓	✓	✓	LIBUR	LIBUR	LIBUR	S	S	✓	✓	✓	

APRIL 2023																													
SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
						LIBUR															LIBUR								

Surakarta, 21 Maret 2023
 Pimpinan/Ketua/Kepala Instansi
 BPJS
 Ketenagakerjaan
 (.....) Drs. H. Anggoro Ari Nurcahyo